

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam beberapa dekade ini isu mengenai pertanggungjawaban sosial atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) menjadi sorotan yang penting, karena konsep CSR merupakan inti dari etika bisnis setiap perusahaan. Utama (2007) mengungkapkan bahwa praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia mulai berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat global terhadap perkembangan perusahaan transnasional atau multinasional yang beroperasi di Indonesia. Tidak hanya itu, Waryanto (2010) memaparkan bahwa perkembangan praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia sudah mendapat dukungan dari pemerintah.

Hal ini, dibuktikan dengan diterbitkannya Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 oleh pemerintah terkait dengan kewajiban perusahaan yang menjalankan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam islam menawarkan aturan yang komprehensif mengenai transparansi dan pertanggungjawaban dari sebuah entitas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari *social community*, dimana sebuah entitas tidak hanya dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban kepada *shareholder* (pemegang saham), pemerintah, kreditur dan masyarakat saja tetapi lebih utama adalah adanya sebuah kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban di hadapan Allah (Sudaryati dan Eskadewi, 2012).

Kini konsep CSR tidak hanya dipakai dalam ekonomi konvensional saja tetapi juga telah berkembang kedalam ekonomi berbasis syariah. Islam pun mengatur tentang hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitarnya. ISR (*Islamic Social Reporting*) pertama kali digagas oleh Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. ISR lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani dan Erlane K. Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Menurut Haniffa, konsep ISR muncul karena adanya keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional, sehingga muncul kerangka konseptual ISR yang sesuai dengan konsep syariah. Konsep ISR tidak hanya membantu dalam proses pengambilan keputusan tetapi juga membantu perusahaan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan seluruh ciptaanNya. Kerangka konseptual ISR yang didasarkan pada ketentuan syariah yang diukur dengan menggunakan sebuah indeks yakni indeks ISR. Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif islam (Lestari, 2016).

Secara khusus indeks ISR adalah perluasan dari social reporting yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu, indeks ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan

mengenai lingkungan, hak minoritas dan karyawan. (Fitria dan Hartanti, 2010).

Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Fitria dan Hartanti, 2010). Indeks ini dikelompokkan menjadi enam tema pengungkapan yaitu *Finance and Investment Theme*, *Product and Service Theme*, *Employee Theme*, *Society Theme*, *Environment Theme* dan *Corporate Governance Theme*. Jika dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya, perkembangan indeks ISR di Indonesia masih tergolong lambat. Hal ini dikarenakan pengungkapan ISR pada perusahaan syariah di Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary*). Namun dengan adanya pasal 4 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 menyebutkan tanggung jawab social dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan. Sehingga makin memperkuat Undang-undang No. 40 Tahun 2007.

Untuk perkembangan indeks ISR di negara-negara Islam seperti Malaysia, Sudan, Bahrain, Uni Emirat Arab, Iran, Palestina, Kuwait, Bangladesh dan Qatar, dimana indeks ISR telah menjadi bagian dari pelaporan organisasi syariah di negara-negara yang bersangkutan (Fitria dan Hartanti, 2010).

. Gagasan utama dalam isu CSR adalah perusahaan tidak hanya dihadapkan pada konsep *single-bottom-line* (SBL) dalam bentuk nilai perusahaan atau catatan keuangan perusahaan, melainkan pada konsep *triple-bottom-line* (TBL) meliputi aspek keuangan *profit*, *people* dan *planet* Jhon Elkington (dalam M. Rachman, Efendi, Wicaksana, 2011). Suatu keharusan bagi perusahaan untuk melihat keterkaitan antara semua elemen yang membentuk system CSR. Karena perubahan dalam satu elemen akan sangat mempengaruhi system secara menyeluruh. Dengan penerapan yang baik, akan lebih mudah dalam memperoleh keseimbangan untuk mencapai sustainability. Tiga elemen (*triple-bottom-line*) merupakan kunci dari konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Friedman (1970) mengemukakan bahwa keberlanjutan perusahaan tidak hanya bergantung pada laba perusahaan (*profit*) melainkan juga bergantung pada tindakan nyata terhadap karyawan di dalam perusahaan dan masyarakat di sekitar perusahaan (*people*) serta lingkungan (*planet*). Perusahaan tidak hanya dianggap memiliki kewajiban ekonomi dan hukum kepada pemegang saham (*shareholder*), tetapi juga memiliki kewajiban sosial kepada para pemangku kepentingan perusahaan (*stakeholder*). Tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemangku kepentingan melibatkan beberapa pihak yakni pelanggan, karyawan, investor, pemasok, kreditur, masyarakat, pemerintah, dan kompetitor.

Dalam penelitian Maulida *et al.* (2014) serta Widiawati dan Raharja (2012) menemukan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap ISR berpengaruh

positif dan signifikan. Namun dalam penelitian Suta dan Laksito (2012) serta Nasir *et al.*(2013) menghasilkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luasnya informasi pada pengungkapan tanggung jawab social perusahaan.

Penelitian Raditya (2012), dan Haniffa & Cooke (2005) menemukan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap CSR dengan menggunakan indeks ISR berpengaruh positif dan signifikan. Namun dalam penelitian Suta dan Laksito (2012) serta Rosiana, Arifin dan Hamdani (2015) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada luas informasi pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan wajib maupun sukarela.

Selain itu *leverage* juga dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), hal ini sesuai penelitian (Suta dan Laksito, 2012) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Alasan yang mendasari hasil penelitian ini karena semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan menunjukkan semakin tinggi tingkat hutang perusahaan tersebut akan berdampak pada timbulnya beban bunga yang dapat menurunkan laba kotor dan berpengaruh terhadap *earnings per share* (EPS). Lain halnya dengan penelitian Widayuni dan Harto (2014) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, hal ini dikarenakan semakin tinggi *leverage*, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran kontrak hutang maka manajer akan berusaha melaporkan laba

sekarang lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian hutang.

Masalah likuiditas merupakan salah satu masalah penting dalam suatu perusahaan yang relatif sulit dipecahkan. Dengan adanya Rasio likuiditas yang bertujuan menaksir kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan komitmen pembayaran keuangannya (Rafika dan Yulius, 2014). Penelitian ini menggunakan rasio lancar untuk mengukur likuiditas. Rasio lancar yang lebih aman adalah berada diatas 1 atau diatas 100% (Sofyan, 2013). Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang aman dianggap mampu untuk mengelola bisnisnya, sehingga menghasilkan tingkat resiko yang rendah (Rafika dan Yulius, 2014). Perusahaan yang secara *financial* memiliki tingkat likuiditas yang kuat, maka perlu mengungkapkan informasi yang lebih rinci untuk menjelaskan kuatnya kinerja (Fitri dan Andi, 2016). Perusahaan dengan rasio likuiditas kuat juga akan memberikan informasi sosial guna memberikan *good news* kepada para pembaca untuk menaikkan citra dan menarik investor (Fitri dan Andi, 2016).

ISR pertama sekali dikemukakan oleh Haniffa (2002) yang menyatakan bahwa adanya keterbatasan pada pelaporan sosial konvensional sehingga ia mengungkapkan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* sesuai ketentuan syariah yang tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga membantu pihak internal perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap Allah SWT dan masyarakat. Setiap perusahaan skala besar ataupun kecil yang ada dalam

pelaksanaan operasionalnya pasti menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Oleh karena itu diharapkan perusahaan dapat mengungkapkan CSR lebih luas lagi.

Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih banyak dan kompleks, mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki *shareholder* yang lebih banyak, serta mendapat perhatian lebih dari kalangan publik, maka dari itu perusahaan besar mendapat tekanan lebih untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosialnya, sehingga perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi aktivitas mereka (Decky dan Tita, 2014). Luasnya tingkat pengungkapan CSR merupakan bentuk respon perusahaan terhadap tekanan yang diterimanya.

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang ada dalam perusahaan. Chariri (2011) telah meneliti hubungan ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan CSR, hasilnya bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. Namun penelitian Djuitaningsih (2012) menyatakan hasil bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap pengungkapan CSR, yang berarti bahwa besar kecilnya ukuran dewan komisaris tidak dapat menjamin adanya mekanisme pengawasan yang lebih baik dan pengungkapan CSR yang lebih baik.

Bahkan Komisaris Independen di beberapa perusahaan diperlukan, yang merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang

tidak memiliki hubungan atau terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi independensinya untuk melindungi kepentingan *stakeholders*. Komisaris independen memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang yang berlaku, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial yang diwajibkan oleh undang-undang. Emiten syariah ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dan diharapkan kegiatan perusahaan akan selaras dengan hukum dan kerangka Islam, salah satunya melalui pengungkapan ISR. Penelitian Muttakin dan Subramaniam (2015) mendukung pengaruh positif antara dewan komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Baidok dan Septiarini (2016), Sulistyawati dan Yuliani (2017) dan Armayanti dan Rahman (2018) menemukan bahwa ukuran komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR. Selain itu, frekuensi rapat dewan komisaris diduga juga berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal ini didukung oleh penelitian Armayanti dan Rahman (2018) yang menemukan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR

Pengungkapan sosial atau CSR dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya. Beberapa dekade terakhir, asumsi tentang definisi *stakeholder* telah mulai berkembang dan berubah secara substantial (Ratnasari, 2011). Pada mulanya, pemegang saham dianggap



sebagai satu-satunya *stakeholder* perusahaan sesuai yang dikemukakan oleh Friedman dalam Ghazali dan Chariri (2007) yang mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya atau sering disebut *profit orientation*, akan tetapi asumsi tersebut dikembangkan lagi oleh Freeman dalam Ghazali dan Chariri (2007) yang menyatakan ketidaksetujuan dengan pandangan ini dan memperluas definisi *stakeholder* dengan memasukkan sudut pandang yang lebih banyak, termasuk kelompok yang dianggap tidak menguntungkan (*adversarial group*) seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator (Roberts, 1992 dalam Ghazali dan Chariri, 2007).

Pelaporan sosial syariah atau *Islamic Social Reporting* (ISR) masih bersifat sukarela sehingga pelaporan CSR setiap perusahaan syariah menjadi tidak sama. Pelaporan yang tidak sama tersebut disebabkan tidak adanya standar yang baku secara syariah tentang pelaporan CSR syariah. Menurut Rahayu (2015) pengukuran CSR masih mengacu kepada *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI) dimana pengukuran ini tentunya kurang tepat karena perusahaan yang diakui sebagai emiten syariah dan dinyatakan memenuhi syariat Islam yang seharusnya mengungkapkan informasi yang membuktikan perusahaan tersebut beroperasi sesuai hukum Islam dimana dengan menggunakan indeks GRI belum menggambarkan prinsip-prinsip Islam seperti belum mengungkapkan terbebasnya dari unsur *riba*, *gharar*, dan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Islam. Indeks ISR untuk entitas islam mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti

transaksi yang sudah terbebas dari unsur *riba*, spekulasi dan *gharar*, serta mengungkapkan zakat, status kepatuhan syariah serta aspek-aspek sosial seperti *sadaqah*, *waqaf*, *qardul hasan*, dan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan (Haniffa, 2002:12).

Selanjutnya kepemilikan manajerial yang merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial maka akan mendorong manajer untuk terus meningkatkan kinerjanya untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan ISR, karena pengungkapan ISR akan mempengaruhi citra perusahaan dan akan berdampak pada laba perusahaan. Penelitian Listyaningsih *et al.* (2018) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index*. Sejalan dengan itu Savira (2015) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Kepemilikan publik diduga juga berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. kepemilikan publik adalah kepemilikan saham oleh masyarakat dengan proporsi kepemilikan di bawah 5%. Populasi penduduk Indonesia mayoritas adalah Muslim, sehingga keberadaan investor publik akan mendorong perusahaan dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial yang berdasarkan pada prinsip Islam agar investor tetap menanamkan dananya di perusahaan. Penelitian Rifqiyah (2016) dan Rahayu (2015) yang menguji pengaruh

kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan CSR, memperoleh hasil bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, menunjukkan banyaknya faktor-faktor finansial maupun non finansial yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR) serta menunjukkan hasil yang beragam dan tidak konsisten. Maka dalam penelitian ini mencoba menguji kembali apakah faktor finansial berupa profitabilitas, likuiditas, dan *leverage*, serta faktor non finansial berupa ukuran dewan komisaris dan kepemilikan saham publik adalah faktor-faktor yang dianggap memiliki pengaruh signifikan atau tidak terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tahun 2016-2018.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin menguji kembali faktor ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR), maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah profitabilitas, *leverage*, likuiditas berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia ?
2. Apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia ?

3. Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* perusahaan terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia.
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh likuiditas terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia.
4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia.
5. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan saham publik terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu akuntansi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif dan konseptual islam bagi peneliti selanjutnya.

Manfaat bagi peneliti selanjutnya adalah diharapkan agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dan juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan bagi penelitian berikutnya.

Bagi Akademisi dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris independen dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diukur dengan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR).

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat bagi perusahaan, investor dan kreditor adalah diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan yang ada di Indeks Saham Syariah Indonesia agar mereka dapat menerapkan

konsep syariah terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan menjadi catatan/koreksi untuk mempertahankan atau memperbaiki kinerja perusahaan serta untuk kreditur dan investor diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk memberi kredit dan berinvestasi.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah rangkuman penyajian mengenai penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini, sehingga pembaca akan memperoleh gambaran jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, tulisan ini terdiri dari 5 bab diantaranya:

##### **BAB I –PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II -TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan penjelasan variabel terikat, variabel bebas, subjek penelitian, hubungan antar variabel, serta pengembangan hipotesis yang akan dibahas oleh penulis. Tinjauan pustaka tersebut meliputi penjelasan tentang *Islamic Social Reporting*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan ukuran dewan komisaris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia.

### BAB III- METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan analisis teori-teori yang akan dibahas, teori-teori mengenai *Islamic Social Reporting*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan ukuran dewan komisaris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di indeks saham syariah indonesia.

### BAB IV-ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum dari hasil penelitian, pengujian kualitas pengumpulan data, hasil pengujian asumsi, hasil pengujian hipotesis.

### BAB V –PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab hipotesis penelitian dan saran bagi peneliti berikutnya dan pihak-pihak yang terkait.